

Evaluasi Kebijakan Pendidikan : Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional

Annisa Darma Yanti, Muhammad Syaifudin, Agus Tino Mulio, Doni Hendra, Elly Marlina
Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: annisadarmay@gmail.com, muhammadsyaifudin@uin-suska.ac.id,
agustinomulio@gmail.com, abinahwa11@gmail.com, ellymarlina@gmail.com

Received 12 Desember 2024

Revised 14 Desember 2024

Accepted 16 Desember 2024

Published 18 Desember 2024

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effectiveness of education policies in overcoming barriers to accessibility, equity, and improving the quality of learning. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach. Data were collected through literature studies, policy document analysis. This study also uses qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that although the policy has succeeded in increasing access to education for underprivileged groups, challenges in implementation, such as target limitations and completeness of data, are still obstacles. In addition, the Independent Curriculum shows the potential to improve the quality of learning, but requires adequate teacher training and infrastructure support. These findings emphasize the importance of policy evaluation based on evidence and the involvement of various stakeholders to increase policy effectiveness. Continuous evaluation can be a catalyst for creating a national education system that is fair, quality, and adaptive to global dynamics.

Keywords: Evaluation, Strategy, Quality, Education

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk efektivitas kebijakan pendidikan dalam mengatasi tantangan aksesibilitas, pemerataan, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan berhasil meningkatkan akses pendidikan untuk kelompok prasejahtera, tantangan dalam implementasi, seperti ketepatan sasaran dan kelengkapan data, masih menjadi kendala. Selain itu, Kurikulum Merdeka menunjukkan potensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi membutuhkan dukungan pelatihan guru dan infrastruktur yang memadai. Temuan ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan berbasis bukti dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Evaluasi yang berkelanjutan dapat menjadi katalisator untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang adil, berkualitas, dan adaptif terhadap dinamika global.

Kata Kunci: Evaluasi, Strategi, Kualitas, Pendidikan

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis untuk

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berintegritas. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan globalisasi, berbagai permasalahan muncul dalam implementasi

Evaluasi Kebijakan Pendidikan : Strategi ...

Annisa Darma Yanti, Muhammad Syaifudin, Agus Tino Mulio, Doni Hendra, Elly Marlina

kebijakan pendidikan. Permasalahan tersebut mencakup kesenjangan kualitas pendidikan, akses yang tidak merata, hingga relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja ([Hamidah et al.](#), 2019). Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pendidikan menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kelemahan, mengoptimalkan strategi, serta memastikan pencapaian tujuan pendidikan nasional yang lebih baik ([Siswopranoto](#), 2022)

Kebijakan pendidikan nasional telah mengalami berbagai transformasi untuk menjawab tantangan tersebut. Beberapa kebijakan strategis, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kurikulum Merdeka, dan digitalisasi pendidikan, dirancang untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Meski demikian, implementasi kebijakan-kebijakan ini menghadapi hambatan struktural dan kultural yang kompleks. Misalnya, pelaksanaan Kurikulum Merdeka masih terkendala oleh disparitas kemampuan sekolah dalam menyediakan sumber daya yang memadai. ([Anwar](#), 2022)

Evaluasi kebijakan pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program-program yang telah dilaksanakan, tetapi juga untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan adaptif. Dalam konteks ini, evaluasi yang berbasis data dan bukti ilmiah menjadi sangat penting ([Sawaluddin](#), 2018). Pendekatan ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan, mulai dari aspek input, proses, hingga output ([Sawaluddin](#), 2021). Selain itu, evaluasi juga dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan masyarakat, sehingga keadilan dalam pendidikan dapat tercapai ([Gunawan dan Surham](#), 2023)

Peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran serta berbagai pihak. Pemerintah, sebagai regulator dan fasilitator, perlu memperkuat koordinasi antarlembaga serta memastikan alokasi anggaran pendidikan yang tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan siswa, juga memiliki

kontribusi yang signifikan dalam mendorong keberhasilan kebijakan pendidikan.

Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi membawa peluang sekaligus tantangan baru bagi sistem pendidikan nasional. Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, misalnya, menawarkan potensi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pendidikan ([Sawaluddin](#), 2020). Namun, penerapan teknologi juga memerlukan kesiapan infrastruktur, kompetensi guru, serta adaptasi kurikulum yang relevan dengan era digital. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan harus mampu menangkap dinamika tersebut agar strategi yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan masa depan ([Ramadhan dan Alkhadri](#), 2021)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas dan keadilan sistem pendidikan nasional. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah diterapkan, termasuk memahami konteks, proses implementasi, serta dampaknya berdasarkan berbagai sumber data sekunder ([Sawaluddin](#), 2022).

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena sifatnya yang interpretatif dan holistik. Penelitian kualitatif memungkinkan analisis mendalam terhadap kebijakan pendidikan, termasuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, hambatan yang dihadapi, serta relevansinya terhadap tujuan pendidikan nasional. ([Yudin](#), 2020). Fokus penelitian kualitatif adalah pada makna, interpretasi, dan pemahaman atas fenomena yang diteliti, sehingga sesuai dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi strategis dalam kebijakan pendidikan.

Kajian pustaka digunakan sebagai metode utama dalam penelitian ini untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis

Evaluasi Kebijakan Pendidikan : Strategi ...

Annisa Darma Yanti, Muhammad Syaifudin, Agus Tino Mulio, Doni Hendra, Elly Marlina

data sekunder yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Melalui analisis ini, peneliti berupaya memberikan gambaran holistik tentang bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada kualitas dan keadilan pendidikan di Indonesia (Jaya, 2021)

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Pendekatan ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan antarvariabel yang muncul dari literatur. Untuk memastikan keabsahan penelitian, langkah-langkah triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Selain itu, peneliti juga memastikan transparansi dalam proses analisis dan dokumentasi data sehingga temuan dapat diverifikasi (Ramadhan, 2021)

Hasil Penelitian dan Pembahasan Kesenjangan Kualitas Pendidikan dan Analisis Realitas dan Tantangan

Kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian serius. Ketimpangan ini terlihat jelas dari perbedaan hasil belajar antara siswa di wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta. Sebagai contoh, siswa di wilayah perkotaan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas pendidikan modern, seperti laboratorium sains, perangkat teknologi, dan perpustakaan yang memadai. Sebaliknya, siswa di daerah terpencil sering kali harus belajar di lingkungan yang minim fasilitas, dengan akses terbatas terhadap sumber daya pendidikan dasar.

Selain itu, ketimpangan kualitas juga muncul akibat disparitas dalam kualifikasi dan kompetensi guru. Data menunjukkan bahwa tidak semua guru memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan atau pengembangan profesional yang memadai. Guru-guru di daerah terpencil sering kali kurang terpapar metode pembelajaran inovatif yang relevan dengan tuntutan kurikulum terbaru, seperti Kurikulum Merdeka. Akibatnya, siswa di wilayah tersebut tidak mendapatkan pembelajaran yang optimal, yang

pada akhirnya memperbesar kesenjangan dengan siswa di daerah lain (Musa dan Sawaluddin, 2020).

Dari sisi kebijakan, upaya pemerintah melalui program seperti sertifikasi guru dan tunjangan profesi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pengajar. Namun, efektivitas kebijakan ini masih belum merata. Banyak guru mengeluhkan proses sertifikasi yang birokratis, sementara tunjangan profesi sering kali terlambat cair, sehingga memengaruhi motivasi mereka dalam menjalankan tugas. Lebih jauh, distribusi guru berkualitas juga menjadi tantangan besar (Sawaluddin dkk, 2022). Daerah terpencil masih mengalami kekurangan tenaga pengajar dengan kualifikasi tinggi, sementara sekolah-sekolah di kota besar sering kali kelebihan guru (Sinambela dkk, 2024)

Kesenjangan kualitas pendidikan juga diperburuk oleh ketidaksiapan sebagian besar sekolah dalam menghadapi perubahan kebijakan secara cepat. Sebagai contoh, pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan karakter siswa menghadapi berbagai kendala di lapangan. Banyak sekolah, terutama yang berada di wilayah tertinggal. Akibatnya, meskipun tujuan dari kebijakan tersebut sudah baik, manfaatnya belum dirasakan secara merata (Turmuzi, 2022)

Mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terfokus. Pemerintah perlu memperkuat investasi pada infrastruktur pendidikan, terutama di daerah-daerah yang paling tertinggal. Selain itu, pemberdayaan guru harus menjadi prioritas melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya di wilayah yang paling membutuhkan. Dengan memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang lokasi atau latar belakang sosial ekonomi mereka, mendapatkan pendidikan berkualitas yang sama, sistem pendidikan nasional dapat lebih mendekati cita-cita keadilan dan kesetaraan.

Keadilan dalam Akses Pendidikan ditinjau dari Dimensi Sosial dan Geografis

Isu keadilan dalam pendidikan mencakup dua dimensi utama: akses dan kesetaraan. Dalam dimensi geografis, daerah terpencil dan

Evaluasi Kebijakan Pendidikan : Strategi ...

Annisa Darma Yanti, Muhammad Syaifudin, Agus Tino Mulio, Doni Hendra, Elly Marlina

terluar sering kali menghadapi tantangan signifikan dalam memperoleh akses pendidikan yang memadai ([Febriani dkk., 2023](#)). Keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pengajar yang kompeten, serta biaya pendidikan yang tinggi menjadi hambatan utama. Selain itu, tantangan geografis sering kali diperparah oleh kondisi alam yang sulit dijangkau, sehingga memperbesar kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan ([Eka dan Sari, 2020](#))

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai salah satu kebijakan strategis guna meningkatkan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Program ini memberikan bantuan langsung kepada siswa dari keluarga prasejahtera untuk meringankan beban pendidikan mereka. Namun, efektivitas program ini sering kali dipertanyakan karena berbagai kendala dalam implementasi, seperti ketidaktepatan sasaran, kurang akuratnya data penerima manfaat, serta lemahnya pengawasan terhadap pendistribusian bantuan.

Di sisi lain, dimensi sosial juga menjadi tantangan signifikan dalam mewujudkan keadilan pendidikan. Kelompok-kelompok marginal, seperti anak-anak dengan kebutuhan khusus, anak jalanan, dan perempuan di komunitas tertentu, sering kali terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan inklusif, pelaksanaan kebijakan ini kerap terhambat oleh minimnya fasilitas pendukung, kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dalam pendidikan inklusif, serta stigma sosial yang masih melekat kuat di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam pendidikan tidak hanya memerlukan kebijakan yang baik, tetapi juga kesadaran masyarakat serta dukungan infrastruktur yang memadai ([Putra dan Mei, 2021](#))

Untuk itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kebijakan yang dirancang perlu didukung oleh penguatan kapasitas lokal, seperti pelatihan guru di daerah terpencil, pembangunan infrastruktur pendidikan yang

merata, dan peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya pendidikan inklusif. Dengan demikian, keadilan dalam akses pendidikan dapat tercapai, baik dari dimensi sosial maupun geografis ([Tambak dkk., 2021](#)).

Evaluasi Kebijakan dan Langkah Strategis untuk Masa Depan

Evaluasi kebijakan pendidikan adalah elemen krusial untuk menilai efektivitas, relevansi, dan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Proses evaluasi ini harus berbasis data yang valid, dilaksanakan secara transparan, dan dilakukan dengan metode yang sistematis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam sistem pendidikan nasional ([Sinambela, 2024](#))

Langkah strategis yang direkomendasikan adalah memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Pemerintah perlu membangun kolaborasi dengan lembaga penelitian, universitas, dan organisasi independen untuk memastikan evaluasi dilakukan secara objektif dan berbasis bukti. Pendekatan ini juga dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi serta aspek kebijakan yang perlu diperbaiki ([Firdaus dkk, 2024](#)) Selain itu, penting untuk menciptakan forum konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, tenaga pendidik, siswa, serta organisasi masyarakat sipil. Forum ini memungkinkan pengumpulan masukan yang beragam dan komprehensif, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat ([Febriani dkk., 2023](#)).

Dalam konteks transformasi pendidikan, evaluasi mendalam tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil, tetapi juga untuk merancang strategi ke depan yang lebih adaptif terhadap dinamika perubahan global dan lokal. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan inovatif, kebijakan pendidikan dapat terus disesuaikan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ([Sawaluddin dkk, 2022](#)). Transformasi ini juga harus menempatkan keadilan sebagai pilar utama, sehingga setiap individu, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan yang

Evaluasi Kebijakan Pendidikan : Strategi ...

Annisa Darma Yanti, Muhammad Syaifudin, Agus Tino Mulio, Doni Hendra, Elly Marlina

bermutu. Melalui evaluasi yang konsisten dan terarah, kebijakan pendidikan memiliki peluang lebih besar untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Asiyah dkk., 2024)

Selain itu, evaluasi juga dapat mengarahkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Dengan data evaluasi yang valid, pemerintah dapat memastikan bahwa investasi di sektor pendidikan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas hasil belajar dan pengurangan kesenjangan akses pendidikan. Pendekatan berbasis data ini akan memperkuat tata kelola pendidikan nasional, sehingga mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Dalam keseluruhannya, evaluasi kebijakan pendidikan adalah fondasi penting dalam transformasi pendidikan nasional. Melalui evaluasi yang mendalam, terarah, dan inklusif, sistem pendidikan dapat terus diperbaiki untuk menjawab tantangan masa depan, memperkuat kualitas pendidikan, serta menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif, tujuan menciptakan sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan berdaya saing global dapat tercapai secara berkelanjutan (Sawaluddin dkk, 2022).

Kesimpulan

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan elemen esensial dalam upaya meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional. Melalui evaluasi yang terstruktur, berbasis data, dan inklusif, kekuatan serta kelemahan kebijakan dapat diidentifikasi secara akurat. Hal ini menjadi dasar untuk merancang strategi yang lebih adaptif dan efektif dalam menjawab tantangan dinamis di sektor pendidikan. Kebijakan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kurikulum Merdeka, meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, evaluasi kebijakan harus mencakup analisis yang mendalam terhadap dimensi sosial dan geografis, yang sering kali

menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan pendidikan. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penelitian, universitas, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan transparansi dan objektivitas. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi juga memungkinkan terwujudnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih inovatif, seperti pengembangan infrastruktur digital, peningkatan pelatihan guru, serta perluasan akses pendidikan untuk kelompok marginal. Evaluasi yang terarah juga berfungsi untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan memperkuat tata kelola pendidikan nasional. Dengan pendekatan yang kolaboratif, inovatif, dan berbasis bukti, evaluasi kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi alat untuk menilai keberhasilan program, tetapi juga menjadi katalis untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, berkualitas, dan berdaya saing global. Transformasi ini adalah langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan inklusif bagi masa depan bangsa

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Gunawan, M. Arif Surham, M. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 149. <https://doi.org/10.59098/talim.v2i02.1255>
- Afriza, Rafli Ramadhan, Roihan Alkhadri, M. A. (2024). Urgensi evaluasi kebijakan pendidikan. *ENTINAS: Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Pembelajaran*, 2(2), 372–379.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Asiyah, N., Thomafi, S., & Zuhdi, M. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum di MIN 14 Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin*,

Evaluasi Kebijakan Pendidikan : Strategi ...

Annisa Darma Yanti, Muhammad Syaifudin, Agus Tino Mulio, Doni Hendra, Elly Marlina

8(September), 79–95.

- Eka Yanuarti dan Devi Purnama Sari HS. (2020). Analisis Perbandingan Pendidikan Multikultural (Indonesia, Amerika, Kanada, Inggris). *Jurnal At-Ta'lim*, 19(1), 46–65.
- Febriani, E., Syaifuddin, M., & Syafaruddin. (2023). Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam. *Journal of Islamic Education El Madani*, 2(2), 114–120.
<http://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JIEE/article/view/65#>
- Firdaus, D. R., Hariyati, N., & Amalia, K. (2024). Menguak Fondasi Evaluasi Pendidikan: Sebuah Kajian Landasan Teoritis Evaluasi Pendidikan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(3), 2843–2851.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6873>
- Hamidah, L., Siregar, S., & Nuraini, N. (2019). Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam Menurut Buya Hamka. *Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan*.
<https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v8i2.2668>
- I Made Laut Mertha Jaya. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan dan Riset Nyata*. Qurdran.
- Musa, F., & Sawaluddin. (2020). Pembiayaan Pendidikan Islam Abad XXI : Analisis Terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pembiayaan Pendidikan Islam di Madrasah. *Mataazir: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(1), 14–26.
- Putra, S. K., & Mei, R. (2021). Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Praktiknya Di Lembaga Pendidikan. *Nazzama: Journal of Management Education*, 1(1), 63.
<https://doi.org/10.24252/jme.v1i1.25204>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- San Mikael Sinambela, Joy Novi Yanti Lumbantobing, Mima Defliyanti Saragih, Al Firman Mangunsong, Chairun Nisa, Johan Pardamean Simanjuntak, & Jamaludin Jamaludin. (2024). Kesenjangan Digital dalam Dunia Pendidikan Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 15–24.
<https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3003>
- Sawaluddin, Koiy Syahbudin, Imran Rido, S. R. (2022). Creativity on Student Learning Outcomes in Al-Quran Hadith Subjects. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 3(2), 257–263.
<https://doi.org/10.46843/jiecr.v3i2.106>
- Sawaluddin. (2021). Evaluasi Pembelajaran Terintegrasi. *Journal of Islamic Education El Madani*, 1(1), 43–55.
- Sawaluddin, M. S. (2020). Langkah-langkah dan teknik evaluasi hasil belajar pendidikan agama islam. *Jurnal PTK & Pendidikan*, 6(1), 13–24.
- Sawaluddin, S. (2018). Konsep Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*.
[https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(1\).1775](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1775)
- Siswopranoto, M. F. (2022). Standar Mutu Pendidikan. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 17–29.
<https://doi.org/10.54437/alidaroh.v6i1.372>
- Tambak, S., Amril, A., & Sukenti, D. (2021). Islamic Teacher Development: Constructing Islamic Professional Teachers Based on The Khalifah Concept. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 117–135.
<https://doi.org/10.31538/nzh.v4i1.1055>
- Turmuzi, M. (2022). Analisis Kesenjangan Kompetensi Profesional dan Pedagogik Mahasiswa Pendidikan Matematika Menggunakan Model Evaluasi Discrepancy. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(5), 6884–6896.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i5.3672>
- Yudin Citriadin. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Dasar*. Sanabil Publishing.